

IMPLIKASI PERAN BABINSA DALAM KEGIATAN DETEKSI DINI GUNA PENCEGAHAN TERORISME TERHADAP KETAHANAN WILAYAH

Gatot Subagya

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
gatotsubagyo71@yahoo.co.id

Akhyari

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
akhyari@manajemenhan.akmil.ac.id

Muryanto

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
muryanto@manajemenhan.akmil.ac.id

Herdin Yudha Puspita

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer
herdinyudha@manajemenhan.akmil.ac.id

Abstract

The aims of this study is to determine the implications of carrying out Babinsa's role in early detection activities to prevent terrorism for regional resilience in Sukoharjo Regency based on public perceptions. The research was conducted in the Kodim 0726/Sukoharjo area. The results showed that (1) Babinsa's role as a Regional Command Unit figure in Sukoharjo Regency was able to encourage Village/Kelurahan government officials and all elements of society by carrying out Territorial Development according to the Danramil's instructions. (2) Implications of implementing Babinsa's role in early detection activities to prevent terrorism for regional resilience of Sukoharjo Regency based on public perception (a) Ideological Aspect, expected to be an effort to prevent the spread of Radicalism and Terrorism in order to maintain regional ideological resilience (b) Political Aspect, expected to be an effort to increase regional political resilience so as to prevent the occurrence of majority dictators and minority tyranny (c) Economic Aspect, a sense of community security that can be created by officers so that economic activities will continue to grow and develop well in the Sukoharjo region (d) Socio-Cultural Aspects, early detection activities in order to prevent terrorism against the resilience of the Sukoharjo Regency region to prevent threats to inter-religious harmony in Sukoharjo (e) Defense and Security Aspects, in several areas Babinsa has not received full support from the community, the proof is that in overcoming security disturbances Babinsa moves alone without any community support..

Keywords The Role of Babinsa, Prevention of Terrorism, Regional Resilience

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan persepsi masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peranan Babinsa sebagai figur Satuan Komando Kewilayahan di Kabupaten Sukoharjo mampu mendorong aparat pemerintah Desa/Kelurahan dan seluruh elemen masyarakat dengan melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil. (2) Implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan persepsi masyarakat (a) Aspek Ideologi, diharapkan menjadi upaya pencegahan penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme dalam rangka menjaga ketahanan ideologi wilayah (b) Aspek Politik, diharapkan menjadi upaya meningkatkan ketahanan politik wilayah sehingga mencegah terjadinya diktator mayoritas dan tirani minoritas (c) Aspek Ekonomi, rasa aman masyarakat yang dapat diciptakan petugas menjadikan kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di wilayah Sukoharjo (d) Aspek Sosial Budaya, kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo dapat mencegah terjadinya ancaman terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Sukoharjo (e) Aspek Pertahanan dan Keamanan, di beberapa daerah Babinsa belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, buktinya dalam mengatasi gangguan keamanan Babinsa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat.

Keywords: Peran Babinsa, Pencegahan Terorisme, Ketahanan Wilayah



PENDAHULUAN

Organisasi TNI khususnya TNI AD, mengenal apa yang disebut komando kewilayahan atau teritorial yang terdiri dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil sampai dengan Babinsa. Babinsa umumnya berada di wilayah desa/kelurahan (Suwarno Sutikno, 2011: 10). Babinsa merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Babinsa memiliki posisi strategis berada di tengah masyarakat dan sehari-hari bersama masyarakat. Babinsa diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa/kelurahan. Babinsa diharapkan mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai permasalahan dan persoalan pertahanan dan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Babinsa merupakan “mata” dan “telinga” bagi TNI AD dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa berbagai informasi, fakta, dan data yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil pengumpulan berbagai informasi dan fakta maupun data-data di tengah masyarakat tersebut dilaporkan secara cepat dan sistematis kepada pimpinan sebagai bahan untuk mengambil keputusan lebih lanjut.

Babinsa dalam konteks pencegahan terorisme, menempati posisi yang sangat vital untuk mendeteksi, mencegah, dan menangkal berbagai kegiatan, aksi maupun gerakan radikalisme yang sangat berkaitan erat dengan aksi terorisme di wilayah. Babinsa didesain menjadi ujung tombak dalam melakukan pendekatan dan komunikasi kepada semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, maupun berbagai pimpinan Ormas, LSM, dalam rangka deradikalisasi (Suranto, 2013: 71). Hal ini sangat penting karena aksi - aksi terorisme yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia bermula dari maraknya paham – paham radikal yang berkembang di tengah masyarakat.

Babinsa dalam melaksanakan kegiatannya, bisa membentuk jaringan mitra Babinsa di Kelurahan-Kelurahan dan desa-desa yang menjadi wilayah tanggung jawabnya. Terbatasnya jumlah Babinsa yang ada akan dapat di atasi dengan adanya mitra Babinsa. Mitra Babinsa itulah yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya deteksi dini. Babinsa dan para mitranya itu bisa setiap saat melaporkan setiap informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Kondisi ini tentunya perlu didukung sejauh mana tingkat pemahaman, tingkat kepedulian dan tingkat kemampuan Babinsa guna melakukan pencegahan terorisme.

Penelitian di lakukan di Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan karena Sukoharjo merupakan daerah penyelaman atau daerah persembunyian dari jaringan terorisme Solo. Seperti diketahui Jaringan terorisme Solo merupakan jaringan teroris terbesar di Indonesia yang memiliki koneksitas di berbagai negara dan hampir semua aksi terorisme di Indonesia terhubung dengan jaringan ini. Meskipun berpusat di Solo, tetapi aksi terorisme tidak dapat dibatasi secara geografis. Aksi aksi yang dilakukan dapat saja direncanakan dan dilakukan di luar wilayah Solo. Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kota Solo di sebelah selatan yang sering dihubungkan dengan jaringan terorisme di Solo karena keberadaan Pondok Pesantren Al Mukmin di dukuh Ngruki desa Cemani kecamatan Grogol dan di perbatasan Sukoharjo dan Solo.

Beberapa tokoh yang terlibat terorisme di Indonesia berkaitan dengan pondok pesantren ini seperti Abu Bakar Ba’asyir yang merupakan pendiri dan pimpinan pondok pesantren , Amrozi dan Ali Gufron pelaku bom Bali adalah mantan santri Al Mukmin, dan beberapa peristiwa terorisme berkaitan dengan pondok pesantren ini, yang terakhir adalah pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta yang bernama Nur Rohman juga mantan santri pondok pesantren Al Mukmin Ngruki. Kemudian serangkaian penangkapan dan penggeledahan terduga teroris di wilayah Kabupten Sukoharjo merupakan indikasi bahwa wilayah ini merupakan daerah yang rentan terhadap paham radikalisme.

Hasil wawancara pendahuluan dengan beberapa narasumber menunjukkan bahwa peran Babinsa masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Grogol. Secara umum pelaksanaan tugas Babinsa di Kecamatan Grogol sudah dinilai baik dan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan ketahanan wilayah. Bahkan mantan napi terorisme yang berhasil dideradikalisasi merasa terbantu untuk dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

Simanjuntak (2015) melakukan penelitian mengenai Peran Babinsa Dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi Di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung). Peran Babinsa dalam deteksi dini ditinjau dari pemahaman, kepedulian dan kemampuan Babinsa masih belum optimal. Kendala Babinsa dalam kegiatan deteksi dini adalah tingkat keamanan khusus

terorisme masih belum kondusif, tingkat kapasitas kelembagaan dirasakan masih sangat kurang ; Kerjasama penanganan antar pihak terkait masih belum ada, peran aktif masyarakat masih belum optimal dan masalah keterpaduan penanganan antar pihak terkait masih belum ada.

Nugroho (2014) mengenai Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas Terhadap Terorisme Oleh Masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara komunitas, kohesi sosial, kontrol sosial, dan *Community Crime Prevention* untuk mencegah terorisme. Studi kasus penelitian ini ada di Desa Cemani sebagai sebuah tempat yang dikenal memiliki masalah dengan terorisme dengan melihat penerapan dari cetak biru pencegahan terorisme BNPT yang dianalisis dengan teori pembangunan *Community Crime Prevention* Whitzman. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa ketiga konsep tersebut memiliki hubungan. Selain itu, di dalam penelitian ini juga ditemukan anomali atas hubungan ideal dari yang seharusnya terjadi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini, adalah :

Bagaimana implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan persepsi masyarakat?

Peran Babinsa

Dalam melaksanakan tugas pembinaan di desa, Babinsa dibantu oleh aparat desa atau tokoh masyarakat serta unsur-unsur terkait yang ada dalam wilayah tugas binaan Babinsa. Babinsa sebagai Prajurit TNI AD dalam mengemban misi TNI AD selalu siap dimanapun dan kapanpun diperlukan. Ada berbagai tugas yang ada di wilayah binaan Babinsa bertugas antara lain melaksanakan tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan binaan, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut selalu mendapatkan petunjuk atau Komando dari atas dalam pembinaan Teritorial yaitu dari Kodim (Yohannes, 2015).

Peran yang harus dilakukan Babinsa dalam memerangi aksi terorisme berdasarkan Skep Kasad Nomor : Kep / 384 / V /2003 Tentang Buku Petunjuk Induk Teritorial yang dijabarkan dalam buku pintar Babinsa (2012) adalah:

- a. Memahami dan menguasai desa/wilayah binaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengadakan pendataan penduduk dan pelihara data tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. Melaksanakan komunikasi dengan Tomas, Toga, Toda dan Todat untuk menjaga wilayah dari aksi-aksi teroris.
- d. Mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh garis keras yang ada di wilayah untuk tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap kegiatan.
- e. Mengenali dan memahami pahami setiap pendatang/penduduk baru yang ada di desa/wilayah binaan.
- f. Mencatat dan melaporkan informasi kejadian sekecil apapun kepada komandan satuan.

Pengertian Terorisme

Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan pemaksaan kehendak dan publikasi publik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik, seperti disampaikan oleh Sukawarsini Djelantik dalam bukunya *Terorisme Tinjauan Psiko Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Sosial* (2010).

Menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab 1 Ketentuan umum, pasal 1 ayat (1), Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang ini mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), pasal6, bahwa setiap orang yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, sebagai berikut:



“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”. (Pasal 6, UURI No 15/2003)

Pasal 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, sebagai berikut:

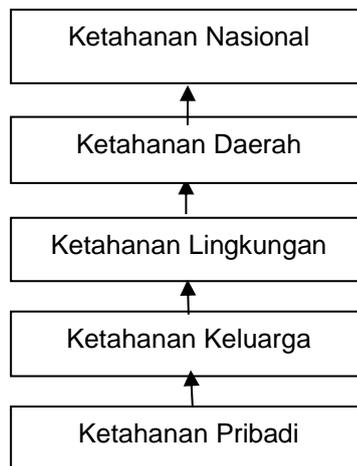
“Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional” (Pasal 7, UURI No 15/2003)

Menurut A.C Manulang, dalam bukunya *Menguak Tabu Intelejen Teror, Motif dan Rezim*, menyampaikan sebagai berikut:

“Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme”. (A.C Manulang, 2001 : 151)

Konsep Ketahanan Nasional

Reivich dan Shatte (2002) menyatakan bahwa ketahanan bukanlah suatu hasil, melainkan suatu proses yang mengarah pada adaptasi dan mengarah pada kembali ke kondisi stabil. Dalam hal lain, Jika ketahanan masyarakat yang merupakan bagian dari ketahanan lingkungan serta dikaitkan dengan ketahanan nasional, maka posisinya dalam skema dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Lemhannas (1993:44-45)

METODE PELAKSANAAN

Penelitian dilakukan di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo. Penentuan sampel informan di dasarkan pada pemahaman mereka terhadap fenomena yang hendak digali oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.



Data yang diperoleh selanjutnya diinterpretasikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) ada tiga tahapan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan wilayah merupakan gambaran dari kondisi sistem (tata) kehidupan wilayah dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap aspek didalam tata kehidupan wilayah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang amat sulit dipantau, karena sangat kompleks. Berdasarkan pemahaman tentang hubungan tersebut diperoleh gambaran bahwa konsepsi ketahanan wilayah akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan khususnya aspek sosial yaitu :

Aspek Ideologi Ketahanan Wilayah

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kondisi mental bangsa yang berlandaskan pada keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Terorisme adalah kejahatan terhadap negara yang mengancam ideologi negara, kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kemandirian negara, dan keselamatan segenap bangsa yang memiliki tujuan politik dan/atau motif lainnya, yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok terorganisir, bersifat nasional dan/atau internasional. Upaya pencegahan dan penanggulangan secara terprogram penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme ini menjadi tantangan berat bagi kita bangsa Indonesia untuk memperkuat sendi-sendi kebangsaan dari rongrongan paham tersebut, selanjutnya untuk menangkalkan paham-paham Radikalisme dan Terorisme kepada masyarakat khususnya generasi muda kita agar tetap mencintai bangsanya (NKRI) perlu dilakukan dengan perlawanan Ideologi dilawan dengan Ideologi, oleh karena itu upaya untuk memerangi terorisme lebih efektif dilakukan melalui kontra radikalisme, dan deradikalisasi. Kontra-radikalisasi adalah usaha untuk membarikade masuknya paham radikal kepada warga masyarakat dan de-ideologisasi mendorong adanya de-radikalisasi para teroris dan simpatisannya

Radikalisme adalah merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem sedangkan Terorisme adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan politik, hukum, sosial maupun ekonomi dengan menggunakan tekanan, ancaman, intimidasi atau kekerasan terhadap masyarakat suatu wilayah atau suatu negara tertentu sebagai pembenaran untuk mencapai tujuannya. Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme, namun sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Berikut adalah keterangan Bapak Sumarso Tokokh Agama Desa Sanggung Kecamatan Gatak mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Babinsa untuk menjaga ketahanan ideologi wilayah.

“Menurut saya sebagai warga masyarakat, peran Babinsa dan Babinkamtibmas di desa Sanggung Kecamatan Gatak sudah cukup baik dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Di dalam setiap pertemuan di tingkat desa selalu memberikan pengertian tentang pentingnya Pancasila dalam bermasyarakat. Pancasila adalah benteng untuk menangkalkan radikalisme dan terorisme” (Wawancara tanggal 13 Mei, 2018).

Hasil senada diutarakan warga lain Bapak Pudjo Martopo Tokoh Masyarakat Desa Jetis Kecamatan Baki sebagai berikut:

“Pak Sayuti Babinsa di Desa Jetis Kecamatan Baki sudah hampir seperti warga Desa Jetis Hampir setiap saat hadir di tengah-tengah warga dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan



anjangsana ke rumah warga pak Sayuti selalu menyisipkan pesan pentingnya Pancasila dan kerukunan umat beragama sambil memberikan contoh di tempat-tempat lain di mana dia pernah bertugas. Saya sudah menganggap Babinsa sebagai keluarga saya sendiri.” (Wawancara tanggal 13 Mei, 2018).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Babinsa selalu berusaha menyisipkan pesan-pesan kepada masyarakat agar menjadikan idiologi bangsa yaitu Pancasila sebagai tameng terhadap radikalisme. Oleh karenanya, pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo diharapkan menjadi upaya pencegahan penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme dalam rangka menjaga ketahanan ideologi wilayah.

Aspek Politik Ketahanan Wilayah

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik wilayah yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan wilayah dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, gangguan, ancaman dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam wilayah yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Ketahanan suatu wilayah dapat berbentuk :

- a. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan yang bersifat absolut, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
- b. Mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, namun perbedaan itu tidak menyangkut nilai dasar sehingga tidak antagonistic yang dapat menjurus pada konflik fisik. Disamping itu harus dicegah timbulnya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- c. Kepemimpinan wilayah mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dengan tetap dalam lingkup Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
- d. Terjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan antar kelompok/golongan dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan wilayah dan kepentingan wilayah.

Pengurangan jabatan sipil yang diisi oleh militer, dan lain sebagainya. Larangan militer dalam berpolitik ini diperuntukkan bagi semua kalangan militer termasuk Babinsa, namun militer tetap memiliki tugas menjaga kestabilan dan ketahanan politik wilayah, hal ini sesuai keterangan Wawan Setiawan Ketua Karang Taruna Desa Pucangan Kecamatan Kartasura wawancara berikut:

“Saya melihat dalam kegiatan sehari hari masyarakat Babinsa di Desa Pucangan Kartasura selalu membaur dengan warga desa. Kami tahu bahwa Pak Sudarto sebagai anggota Babinsa TNI tidak berpolitik atau netral. Namun begitu dalam berbagai pertemuan ketika diminta tanggapan tentang politik disampaikan bahwa salah satu tugasnya adalah menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Desa binaannya. Dengan situasi yang kondusif masyarakat tidak akan mudah terpengaruh hal-hal yang menimbulkan perpecahan, salah satunya adalah paham radikalisme, sehingga dapat berjalan baik.” (Wawancara tanggal 14 Mei, 2018).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa Babinsa sangat berperan menciptakan situasi politik daerah yang kondusif. Aksi terorisme jelas adalah perbuatan melawan hukum dan ketidakmampuan mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya untuk meningkatkan ketahanan politik maka pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo diharapkan menjadi upaya meningkatkan ketahanan politik wilayah sehingga mencegah terhadinya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

Aspek Ekonomi Ketahanan Wilayah

Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi kehidupan perekonomian bangsa, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan



menciptakan kemandirian ekonomi wilayah dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan kepada mantapnya ketahanan ekonomi melalui terciptanya iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan daya saing dalam lingkup persaingan global.

Salah satu aspek yang terlihat adalah kesigapan aparat keamanan menyikapi teror-teror tersebut. Berkaitan dengan aspek etkonomi ketahanan wilayah, peran Babinsa ternyata juga sangat penting dalam meningkatkan aspek etkonomi ketahanan wilayah. Berikut keterangan Saudara Sutari Tokoh Pemuda Desa Sanggung Kecamatan Gatak.

“Pada awal tahun 2016 terjadi kelangkaan pupuk di Desa Sanggung Kecamatan Gatak, petani di desa kami sampai kebingungan mencari pupuk dan ternyata ada permainan dalam pendistribusian pupuk. Babinsa Desa kami pak Suhardi, kemudian melapor ke Danramil dan ternyata baru kami ketahui kalau pihak Koramil dan Kodim tengah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertanian dengan program Upsus untuk meningkatkan hasil pertanian. Salah satunya adalah program pendampingan oleh Babinsa dalam menyukseskan Swa Sembada pangan. Saat ini pengawasan dari Babinsa distribusi pupuk dapat terpenuhi” (Wawancara tanggal 15 Mei, 2018).

Upaya deradikalisasi ternyata harus diimbangi dengan sisi perekonomian seperti upaya khusus (upsus) pendampingan Babinsa terhadap petani. Oleh karena itu implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya ketahanan ekonomi sangatlah besar karena rasa aman masyarakat yang dapat diciptakan petugas menjadikan kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di wilayah Sukoharjo.

Aspek Sosial Budaya Ketahanan Wilayah

Wujud ketahanan sosial budaya wilayah tercermin dalam kehidupan sosial budaya di suatu wilayah yang dijiwai kepribadian wilayah berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia adalah pengembangan kondisi sosial budaya dimana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya yang dilandasi nilai-nilai Pancasila

Banyaknya aksi teror yang mengatasnamakan aliran kepercayaan atau paham tertentu menimbulkan konflik komunal yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berada dalam sistem sosial budaya Indonesia. Konflik tersebut memunculkan disintegrasi terhadap nilai fundamental bangsa Indonesia. Karena sebegini besar aksi-aksi teror yang muncul tersebut menginkankan adanya pembentukan sebuah negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal inilah yang bisa menyebabkan konflik horizontal dalam masyarakat. Karena pada dasarnya negara Indonesia mempunyai masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Apabila ada dari salah satu komponen tersebut memaksakan kehendaknya maka akan menimbulkan konflik tersebut.

Dapat dikatakan bahwa dampak adanya konflik seperti terorisme merupakan sebuah aksi yang terjadi karena ketidakpuasan terhadap sistem nilai yang berada dalam masyarakat. Aksi teror tersebut dilakukan sebagai sarana untuk memaksakan kehendak terhadap pemerintah. Selain itu terorisme merupakan bentuk kekecewaan sekelompok orang yang kepentingannya tidak terakomodir oleh pemerintah. Bisa dikatakan bahwa terorisme juga merupakan konflik horizontal dan vertikal, karena kelompok tersebut tidak hanya berkonflik dengan anggota masyarakat tapi juga dengan pemerintah.

Adanya tindakan teroris berdampak dalam sistem sosial budaya Indonesia, dampak tersebut dapat memberikan sebuah pandangan bahwasannya aksi terorisme tersebut mendapatkan pengertian kalau teror tersebut sejatinya telah menciptakan adanya disintegrasi nilai sosial terhadap nilai Pancasila. Berikut wawancara dengan Eko Joko S Warga Desa Pucangan Kartasura mengenai peran Babinsa terhadap peningkatan Kamtibmas wilayah



“Babinsa di Desa Pucangan Kartasura bersama-sama dan bersinergi dengan Babinkamtibmas, Kepala Desa, Ketua Lingkungan (RT/RW) dan Ormas serta Karang Taruna mampu meningkatkan kesadaran masyarakat desa Ngaderijo Kartasura untuk menciptakan system keamanan lingkungan.” (Wawancara tanggal 15 Mei, 2018).

Senada dengan hal tersebut, berikut adalah keterangan informan penelitian Bapak Wido Suwarno Tokoh Masyarakat Desa Godog Kecamatan Pookarto lainnya:

“Babinsa di Desa Godog Kecamatan Polokarto mampu membantu masyarakat dalam beberapa konflik sosial yang sempat terjadi di desa kami. Salah satunya saat akan terjadi sweeping dari kelompok Islam garis keras terhadap masyarakat yang masih berkumpul setelah kegiatan hajatan pernikahan yang diduga melakukan perjudian dan minum minuman keras. Babinsa dan Babinkamtibmas mengadakan koordinasi dengan kedua belah pihak sehingga konflik sosial dapat dicegah” (Wawancara tanggal 15 Mei, 2018).

Peningkatan keamanan dan ketertiban telah terbukti menanggulangi paham radikalisme serta konflik sosial kemasyarakatan. Babinsa juga mampu mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah sosial dengan baik bersama dengan komponen masyarakat yang lain. Oleh karena itu implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo khususnya ketahanan sosial budaya sangatlah besar karena dapat mencegah terjadinya ancaman terhadap kerukunan antar umat beragama yang ada di Sukoharjo. Hal ini dikarenakan, beberapa aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok tertentu di atasnamakan oleh ajaran agama, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan stigma negatif terhadap agama tertentu. Keberhasilan Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo akan dapat meningkatkan ketahanan wilayah dalam bidang sosial budaya.

Aspek Pertahanan dan Keamanan Ketahanan Wilayah

Prajurit Babinsa harus memiliki kepedulian untuk membina dan mengarahkan desa yang menjadi tanggung jawabnya, dengan berbagai kelebihan, melalui pengetahuan, akhlak, kepribadian, kehidupan keluarga yang harmonis dan hidup sederhana. Setiap prajurit Babinsa dalam melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan yang dapat digunakan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat.

Berdasarkan hasil observasi keberadaan Babinsa sebagai pembina di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo mampu membantu masyarakat sebagai kecintaannya kepada masyarakat guna mewujudkan pribadi yang dicintai, dihormati dan disegani melalui aktifitasnya yang langsung dapat menyentuh kepentingan masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sumarso Tokoh Agama Desa Sanggung Kecamatan Gatak Sukoharjo sebagai berikut:

“Babinsa di desa saya sangat mengenal tokoh masyarakat dan warga lain dengan baik karena sering bergaul. Beliau juga sering berganung dengan warga dan secara tidak langsung memberikan arahan kepada warga agar waspada terhadap Keamanan dan Ketahanan wilayah terutama dari bahaya terorisme. Jika ada warga yang meminta bantuan, Babinsa selalu rajin dalam membantu dan menyelesaikan masalah” (Wawancara tanggal 10 Mei, 2018).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa, Babinsa dapat memantau setiap perkembangan situasi yang ada di wilayah kerjanya terutama perkembangan situasi yang mengarah kepada konflik sosial serta mampu untuk mengkoordinasikan penyelesaian dengan baik karena selalu bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat lainnya. Sehingga keberadaan Babinsa sebagai figur Satuan Komando Kewilayahan kehadirannya akan selalu diharapkan dan didambakan oleh masyarakat.



Untuk meningkatkan peran Babinsa dan aparat pemerintah desa/kelurahan yang optimal maka diperlukan tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukungnya, karena bagaimanapun baiknya program yang dilakukan oleh Babinsa dan aparat pemerintah desa/kelurahan tanpa didukung dengan tingkat kesadaran masyarakat, maka pelaksanaan tugas tersebut akan mengalami hambatan. Oleh karena itu desa-desa maupun kelurahan yang ada baik di perkotaan, pinggiran kota, maupun didesa-desa perbatasan Kabupaten Sukoharjo, harus perlu dioptimalkan dengan peran Babinsa dan aparat pemerintah desa/kelurahan yang terkait dengan pembinaan pada masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan lingkungan yang nyaman, serta aman dari berbagai gangguan.

Penciptaan suatu kondisi lingkungan yang aman dan terkendali memang merupakan tugas kepolisian, seringkali tidak mampu mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat karena luasnya wilayah yang dijangkau apalagi terdapat di daerah-daerah pelosok desa, kondisi-kondisi ini juga tentunya akan melibatkan aparat terkait diantaranya adalah peran Babinsa dan aparat pemerintah desa. Dengan berfungsinya peran Babinsa secara optimal maka diharapkan akan mampu menciptakan ketahanan wilayah yang baik.

Kenyataannya berdasarkan hasil observasi tugas Babinsa di Kabupaten Sukoharjo belum seluruhnya optimal, belum optimalnya tugas Babinsa karena di beberapa daerah Babinsa belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, buktinya dalam mengatasi gangguan keamanan Babinsa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat. Lemahnya dukungan masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan paham radikalisme dan terorisme diupayakan untuk menciptakan rasa aman masyarakat, meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta pada akhirnya meningkatkan ketahanan wilayah. Sasaran tersebut dapat tercapai apabila ada kerjasama dan peran serta masyarakat sebagaimana keterangan Bapak Tri Wahyudi, S.H., M.M. sebagai berikut:

“Minimnya informasi dari masyarakat atas kegiatan seseorang/sekelompok orang yang sangat tertutup di tengah masyarakat serta kecenderungan masyarakat sekarang yang sudah mengarah pada ketidakpedulian terhadap warga sekitar dapat menghambat tugas Babinsa dalam melakukan deteksi dini untuk mencegah aksi terorisme” (Wawancara tanggal 11 Mei, 2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran serta masyarakat untuk memberikan informasi kepada Babinsa cenderung menurun seiring dengan ketidakpedulian warga terhadap warga lain di sekitarnya. Hal ini pada akhirnya akan menghambat peran Babinsa sendiri dan menurunkan ketahanan wilayah.

Pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo selain tugas personal yang sudah dijalankan oleh Babinsa yang ada di setiap Kecamatan juga diperkuat dengan upaya yang dilakukan oleh Kodim 0726/Sukoharjo sendiri berupa Komsos (Komunikasi Sosial). Komunikasi Sosial Kodim 0726 Sukoharjo dengan Komponen Masyarakat setiap tahun dilaksanakan dengan mengundang Kapolres Sukoharjo, Bupati/Wakil Bupati Sukoharjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Ketua pengadilan Negeri Sukoharjo, Ketua/Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ormas se-Kabupaten Sukoharjo.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Babinsa dalam menjalankan perannya dalam melakukan kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme akan secara otomatis meningkatkan ketahanan wilayah karena sekecil apapun indikasi kearah tindakan terorisme akan dapat terdeteksi sejak awal oleh masyarakat dan Babinsa. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Babinsa merupakan upaya dalam mewujudkan daya tangkal dapat memberikan kontribusi penting guna terwujudnya ketahanan wilayah. Kondisi ketahanan wilayah yang tangguh sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

SIMPULAN



Implikasi pelaksanaan peran Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan persepsi masyarakat adalah:

- a. Menjadi upaya pencegahan penyebaran paham Radikalisme dan Terorisme dalam rangka menjaga ketahanan ideologi wilayah.
- b. Menjadi upaya meningkatkan ketahanan politik wilayah sehingga mencegah terhadinya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
- c. Rasa aman masyarakat yang dapat diciptakan petugas menjadikan kegiatan perekonomian akan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik di wilayah Sukoharjo.
- d. Keberhasilan Babinsa dalam kegiatan deteksi dini guna pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Sukoharjo akan dapat meningkatkan ketahanan wilayah dalam bidang sosial budaya.
- e. Peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan paham radikalisme dan terorisme diupayakan untuk menciptakan rasa aman masyarakat, meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta pada akhirnya meningkatkan ketahanan wilayah.

SARAN

Petugas Babinsa di wilayah Kodim 0726/Sukoharjo hendaknya mengevaluasi sejauh mana program dan rencana kegiatan yang telah diterapkan telah tercapai, yang selanjutnya diharapkan mampu membuat strategi kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya melalui kegiatan deteksi dini.

Bagi Kodim 0726/Sukoharjo, diperlukan upaya-upaya peningkatan kemampuan Babinsa untuk melakukan kegiatan deteksi dini yang lebih baik sehingga ketahanan wilayah dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Induk Tentang Pembinaan Teritorial TNI AD.

Buku Petunjuk Teknik Tentang Badan Pengumpul Keterangan di Satuan Kodim.

Djelantik, S, 2010. *Terorisme Tinjauan Psiko Politis , Peran Media ,Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.

Hikmat, dkk, 2004, *Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta: Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI.

Lemhannas, 1993. *Ketahanan Wilayah*, Jakarta: Balai Pustaka.

Manullang, AC, 2001. *Menguak Tabu Intelejen Teror, Motif dan Rezim* : Phanta rei.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.

Nugroho, Kunto Hedy dan Dadang Sudiadi, 2014. *Pencegahan Kejahatan Berbasis Komunitas Terhadap Terorisme Oleh Masyarakat Desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*, Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Reivich, K., & Shatté, A., 2002. *The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life's inevitable obstacles*. New York, NY, US: Broadway Books.



- Simanjuntak, Komarudin, 2015. Peran Babinsa Dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi Di Wilayah Kodim 0618/BS Kota Bandung), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol 21, No 1 (2015).
- Suranto, 2013. *Program Deradikalisasi Demi NKRI*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suwarno, Sutikno, 2011. *Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa*, Yogyakarta :Tiara Wacana.
- Yohanes, Sakai, 2015. Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Setulang Dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau), *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2015, 3 (2): 307-322.

